

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA (TELAAH ASPEK BUDAYA)

Oleh: Masriani

Abstrak

Pendidik dan budaya merupakan dua hal penting yang saling terkait satu sama lain dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Di satu sisi, pengembangan dan pelestarian kebudayaan berlangsung dalam suatu proses pendidikan dan memerlukan perekayasa pendidikan karena budaya adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Dalam era Globalisasi, pendidikan menemui tantangannya, dimana harus selalu berbenah dan memegang prinsip-prinsip pendidikan sebagai wahana penyadaran diri dan proses humanisasi tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan, pendidikan harus menghindarkan dampak negatif yang ditimbulkan laju arus globalisasi. Yakni dengan menawarkan reparadigmatisasi pendidikan sebagai upaya preventif, dan harus menjadi tanggung jawab semua komponen anak bangsa di negeri ini.

A. PENDAHULUAN

Belum pernah kita dengar suatu masa di mana pendidikan tidak dibicarakan. Di semua negara dan di semua waktu, pendidikan adalah masalah yang tak pernah selesai. Pendidikan selalu terasa tidak pernah memuaskan. Apakah Anda mengira negara maju tidak pernah lagi membicarakan pendidikan mereka? Apakah mereka sudah puas? Tidak, orang-orang di negara maju sekalipun masih mengkritik keadaan pendidikan di negaranya. Mengapa manusia tidak pernah puas terhadap pendidikan?

Mudah dipahami karena semua orang berkepentingan dengan pendidikan. Orang yang ingin memperbaiki seseorang, sekelompok orang, suatu negara, dan bahkan dunia, pasti akan melakukannya, langsung atau tidak langsung, melalui pendidikan. Orang yang akan merusak negara juga akan melakukannya melalui pendidikan. Orang yang mengerti pendidikan tentu akan ikut bicara pendidikan. Orang yang tidak tahu apa-apa tentang pendidikan juga ikut

berbicara tentang pendidikan karena anak dan turunannya telah dan akan mengikuti pendidikan.

Pendidikan adalah masalah bersama, semua orang berkepentingan dengan pendidikan. Berbeda halnya bila yang dibicarakan masalah pabrik nuklir, sekalipun menyangkut masalah bersama, tidak setiap orang membicarakannya. Adapun pendidikan, semua orang membicarakannya, mencercanya, mengutuknya, tidak puas terhadapnya tetapi ia tetap saja menyerahkan pendidikan anaknya ke lembaga pendidikan. Amat jarang terdengar orang yang memuji pendidikan. Itulah sebabnya pendidikan tidak pernah selesai. Dan tidak pernah selesai dibicarakan. Mengapa? Pertama, fitrah setiap orang menginginkan yang lebih baik. Kedua, karena teori pendidikan –dan teori pada umumnya– selalu ketinggalan oleh kebutuhan masyarakat. Umumnya, teori pendidikan dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat pada tempat dan waktu tertentu. Karena waktu berubah dan tempat selalu berubah, kebutuhan masyarakat juga berubah. Bahkan perubahan tempat dan waktu itu ikut pula mengubah sifat manusia. Karena adanya perubahan itu, masyarakat merasa tidak puas dengan teori pendidikan yang ada. Ketiga, karena pengaruh pandangan hidup. Pada suatu waktu mungkin seseorang telah puas dengan keadaan pendidikan di tempatnya karena sudah sesuai dengan pandangan hidupnya dan suatu ketika ia terpengaruh oleh pandangan hidup yang lain. Akibatnya, berubah pula pendapatnya tentang pendidikan yang tadinya sudah memuaskannya.¹

Selanjutnya manakala berbicara tentang problematika pendidikan modern, maka dalam hemat kami, ada di tiga kawasan masalah problema tersebut muncul, yakni masalah pada dataran filosofis, teoritis, dan praktis (realita di lapangan). Kemudian jika kita pilah satu persatu di tiga sektor tersebut, maka akan memunculkan banyak sejumlah problematika pendidikan. Dalam Makalah ini, penulis mencoba membatasi cakupan masalah dalam dataran praktis (realita yang terjadi di lapangan). Yakni ***“Problematika pendidikan di Indonesia dalam telaah aspek budaya”***.

¹ Ahmad Tafsir, Pendidikan Tambal sulam, dalam *www. “Pikiran Rakyat Online”*, 15 Februari 2008.

Batasan sederhana dari budaya adalah; hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Dalam pengertian lain budaya adalah segala perilaku manusia yang senantiasa dilakukan terus-menerus, bisa berbentuk kebiasaan, pola hidup, aturan/norma-norma. Budaya itu sendiri bisa berdimensi dua, budaya yang baik dan budaya buruk. Budaya dalam perkembangannya bisa mengalami perubahan, pergeseran, maupun memunculkan budaya-budaya baru, seiring perkembangan dan dinamisasi kehidupan manusia. Sehingga bisa dikatakan bahwa budaya di satu sisi bisa tetap lestari, tak lekang dan tak lapuk oleh perubahan jaman. Namun di sisi lain, budaya dapat “terwarnai” oleh perubahan peradaban dan perubahan zaman. Sebagai unsur pranata sosial tentunya budaya juga bersinggungan dengan dimensi politik, hukum, ekonomi, sosial, maupun aspek lainnya.

Pendidik dan budaya merupakan dua hal penting yang saling terkait satu sama lain dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Di satu sisi, pengembangan dan pelestarian kebudayaan berlangsung dalam suatu proses pendidikan dan memerlukan perekayasaan pendidikan. Sementara itu, pengembangan pendidikan juga membutuhkan sistem kebudayaan sebagai akar dan pendukung berlangsungnya pendidikan tersebut. Pengembangan kebudayaan membutuhkan kebebasan kreatif sementara pendidikan memerlukan suatu stabilitas budaya yang mapan.²

Selanjutnya masalah pendidikan yang bersinggungan dalam lingkup kultur/budaya, penulis mencoba menginventarisir ke dalam dua hal. Yakni pertama, masalah pergeseran budaya global; kedua, masalah budaya sekolah berkenaan dengan lingkungan dan mentalitas/moralitas.

B. Globalisasi dan Imbasnya dalam Dunia Pendidikan.

1. Pemaknaan globalisasi.

Istilah globalisasi mungkin sudah sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat kita, ia adalah gambaran peradaban canggih dan impian kehidupan manusia. Kemudahan transportasi, informasi dan komunikasi menjadi ciri

² Abdul Munir Mulkan, *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan dan da'wah* (Yogyakarta: Sipress, 1993), hlm, 29.

husus dalam bidang teknologi komputer dunia seakan terlipat yang dapat terjangkau kapan saja kita mau, bahkan Anthony Giddens menyebutnya sebagai *"time-space distanciation"*, yaitu dunia tanpa batas: ruang dan waktu bukanlah kendala yang berarti dalam kondisi seperti ini.

Namun demikian sedikit orang yang sadar dan secara kritis memahami globalisasi yang secara sistematis mengancam kehidupan manusia, sebab globalisasi hanya dipahami dari aspek kemajuan teknologi saja bukan dari aspek-aspek lain yang sesungguhnya mempunyai implikasi sosial luar biasa dalam kehidupan manusia.

Globalisasi berasal dari kata *"the globe"* (bhs. Inggris) atau *"la monde"* (bhs. Perancis) yang berarti bumi, dunia ini. Maka secara sederhana globalisasi dapat diartikan sebagai proses menjadikan semuanya satu bumi atau satu dunia. Secara lebih lengkap globalisasi banyak didefinisikan oleh para ilmuwan dunia, misalnya Baylis dan Smith misalnya, mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses meningkatnya keterkaitan antara masyarakat sehingga satu peristiwa yang terjadi di wilayah tertentu semakin lama akan berpengaruh terhadap manusia dan masyarakat di belahan bumi yang lain. Sedangkan Antony Giddens memandang globalisasi sebagai sebuah proses sosial yang mengglobal.³

Dalam dimensi lain Wallerstein seorang pelopor teori sistem dunia memandang globalisasi tidak sebatas hubungan lintas batas negara, namun globalisasi merupakan wujud kejayaan ekonomi kapitalis dunia yang digerakkan oleh logika akumulasi kapital, yang menurut Kenichi Ohmae ditandai dengan 4 "I", yaitu Investasi, Industri, informasi, dan Individual.⁴ Senada dengan Wallerstein, Jin Young Chun ilmuwan politik asal Korea mendefinisikan globalisasi sebagai proses terintegrasinya dunia melalui peningkatan arus kapital, hasil-hasil produksi, jasa ide, dan manusia yang lintas batas negara. Lebih lanjut Jin Young Chun menambahkan pada tataran tertentu globalisasi merupakan hasil alami dari kecenderungan ekspansi pasar

³ Lihat, [www.sociologyonline.co.uk/Global Giddens 1.htm](http://www.sociologyonline.co.uk/Global%20Giddens%201.htm).

⁴ Kenichi Ohmae, *Berakhirnya Negara Bangsa*, terj. Sunarto Ndaru Mursito, *Jurnal Analisis CSIS XXV*, no.2, 1996. lihat juga, Nurani Suyomukti, *Pendidikan Berperspektif Global* (Yogyakarta:Al-Ruzz Media,2008), hlm, 42.

yang sejalan dengan keinginan perusahaan maupun manusia mengejar kesempatan-kesempatan bisnis.⁵

Dari definisi-definisi di atas, persoalannya akan menjadi lain ketika globalisasi dikaitkan dengan masalah ekonomi, politik-ideologi, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya. Mengaitkan globalisasi dengan persoalan tersebut akan menjadi rumit dan semakin spesifik meskipun terdapat keterkaitan yang erat. Hal ini juga akan mempengaruhi sikap seseorang dalam merespon globalisasi.

Globalisasi dalam pengertian ekonomi misalnya, ia berarti proses internasionalisasi produk, penetrasi lintas negara dari industri, perluasan pasar modal, penjajahan barang-barang konsumsi ke negara-negara dunia ketiga. Sedangkan sebagai pengertian politik-ideologi, globalisasi diartikan sebagai liberalisasi perdagangan dan investasi, deregulasi, privatisasi, adopsi sistem politik demokrasi, dan otonomi daerah. Sebagai pengertian ilmu pengetahuan, globalisasi tidak hanya berarti dipakainya kaidah kebenaran ilmu yang bersumber kepada empirisme dan cara penalaran konteks masyarakat dan alam negara-negara maju bagi negara-negara tertinggal tanpa memperhatikan kekhasan masyarakat dan alamnya, tetapi juga termasuk usaha-usaha untuk membangun kebenaran ilmu untuk tujuan pemanusiaan manusia.

Sebagai pengertian teknologi, globalisasi berarti penguasaan dunia melalui penguasaan teknologi komunikasi dan informasi, juga teknologi penghancur lingkungan serta bioteknologi pengancam manusia tanpa kendali. Dan sebagai pengertian budaya, globalisasi tidak hanya proses harmonisasi ide-ide dan norma-norma, seperti pluralitas keberagaman, HAM, namun juga gaya hidup konsumerisme, hedonisme dan pornografi. Proses seperti ini merupakan gerakan menuju kewarganegaraan dunia universal yang melampaui batasan negara kebangsaan.⁶

⁵ Imam Machali, *Pendidikan Nasional dalam telikungan Globalisasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media & Presma F.Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), hlm, 110.

⁶ Wahono Nitiprawiro, *Teologi Pembebasan, sejarah, metode, praksis, dan isinya*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm, 15.

2. *Implikasi dalam dunia pendidikan.*

Dalam dunia pendidikan yang merupakan salah satu sistem sosial, pada akhirnya juga mengalami dampak arus globalisasi. Konsekuensi yang harus dibayar oleh lembaga pendidikan adalah perubahan logika pendidikan. Lembaga pendidikan; sekolah, perguruan tinggi yang semula merupakan pelayanan publik (*publik servant*) dengan memposisikan pembelajar (siswa dan mahasiswa) sebagai warga negara (*citizen*) yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak⁷, namun ketika status BHMN (Badan Hukum Milik Negara) menjadi target, PTN (Perguruan Tinggi Negeri) sebagai privatisasi pendidikan, tidak lebih sebagai produsen, sedangkan pembelajar (mahasiswa dan siswa) sebagai konsumennya. Jalinan relasional yang membentuk pun mengarah pada transaksi harga antara penjual dan pembeli. Sementara produk (*output*) yang dihasilkan adalah pesanan dari pemodal untuk memenuhi kebutuhan produsen dan mengabaikan aspek kesadaran kritis siswa.⁸

Secara detail akibat dari privatisasi pendidikan (baca: penyelenggaraan pendidikan yang semula tanggung jawab utama pemerintah, diserahkan kepada pihak swasta) yang berujung komersialisasi pendidikan berdampak pada:

Pertama, biaya pendidikan menjadi mahal, sulit dijangkau masyarakat luas. Mahalnya biaya pendidikan telah menyebabkan pendidikan yang semula adalah proses *humanisasi* (memanusiakan manusia) telah berubah menjadi *dehumanisasi* atau secara tidak langsung telah mengupayakan pemunduran hakikat kemanusiaan yang mampu mengaktualisasikan dirinya dan mampu menghadapi kontradiksi-kontradiksi dalam kehidupan; seperti ditemukan kasus kekerasan dalam rumahtangga akibat tekanan psikis karena mahalnya biaya pendidikan, banyak ditemukan anak yang bunuh diri karena malu belum bayar SPP, atau dijumpai orang tua yang membunuh anaknya karena trauma dengan beban yang akan dihadapi. Kenyataan ini biasa terjadi dalam lingkungan lembaga pendidikan yang tidak memiliki kreativitas dan inovasi dalam pendanaan (*fund raising*), sehingga hanya mengandalkan siswa dan orang tua sebagai target sumber dana.

⁷ Dalam UUD 1945 ayat 31 disebutkan; "tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran".

⁸ Triyono Lukmantoro, *PTN dalam Hegemoni Fundamentalisme Pasar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm, 122.

Kedua, memperlebar gap dalam kualitas pendidikan. Privatisasi dapat meningkatkan kompetisi. Sisi lain dari kompetisi adalah menciptakan poralisasi lembaga pendidikan. Lembaga yang menang dalam persaingan dan perburuan dana akan menjadi sekolah unggulan. Sebaliknya lembaga yang kalah akan semakin terpuruk dan tersingkir, sehingga ada asumsi yang telah membudaya dalam masyarakat bahwa sekolah yang mahal akan menelorkan *outcome* atau *output* yang berkualitas atau bagaimana bisa berkualitas kalau biaya pendidikannya tidak mahal?.

Ketiga, melahirkan diskriminasi sosial. Kesempatan memperoleh pendidikan semakin sempit dan diskriminatif, sehingga empat hasil konvensi hak anak (KHA) yang harus diberikan dan dinikmatinya sebelum mereka dewasa oleh PBB yang telah diratifikasi pemerintah melalui Keppres Nomor 26 tahun 1990 yaitu: hak untuk bertahan hidup (*right for survival*), hak mendapat perlindungan (*right for protection*), hak partisipasi (*right for partisipation*), dan hak tumbuhkembang (*right for development*)⁹ yang harus dijadikan pedoman secara yuridis dan politis telah diabaikan dan dilanggar.

Keempat, menimbulkan stigmatisasi, ke arah pelabelan sosial. Sekolah yang bagus dan ternama diidentikkan dengan sekolahnya orang kaya, sebaliknya sekolah sederhana adalah sekolahnya kaum miskin.

Kelima, menggeser budaya akademik menjadi budaya ekonomis, sehingga pendidikan ahanya diarahkan untuk mobilitas vertikal, yaitu upaya peningkatan kecakapan untuk menghasilkan pendapatan ekonomi yang lebih baik dan mengkondisikan tenaga produktif untuk dijual dalam bursa kerja. Para guru akan memiliki mentalitas "*pedagang*" ketimbang mentalitas pendidik. Mereka lebih tertarik mencari pendapatan daripada mengembangkan pengetahuan. Mereka lebih terdorong untuk mengumpulkan "*kredit koin*" daripada "*kredit poin*". Di PT, fenomena ini melahirkan dua kategori dosen yaitu "*dosen luar biasa*" dan "*dosen biasa di luar*".

Keenam, memperburuk kualitas SDM dan kepemimpinan masa depan. Didorong oleh misi untuk meningkatkan akumulasi kapital sebesar-besarnya, lembaga pendidikan akan lebih banyak menerima pelajar gedongan meski ber-IQ pas-pasan. Pelajar berprestasi tapi miskin banyak kesulitan melanjutkan

⁹ Nurani Suyomukti, *Pendidikan Berperspektif Global* (Yogyakarta: Al-Ruzz Media, 2008), hlm. 33.

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mobilitas sosial vertikal hanya akan menjadi milik orang kaya.¹⁰

Dengan demikian pendidikan yang semula sebagai aktivitas sosial budaya berubah menjadi komoditas usaha yang siap diperjual belikan. Biaya pendidikan menjadi mahal sehingga tidak terjangkau oleh rakyat miskin dan hanya terjangkau oleh orang kaya, gelar dalam atau luar negeri bergengsi pun siap diperdagangan kepada yang mampu membelinya.

Inilah babak baru kapitalisme pendidikan global yang melucuti makna pendidikan. Pendidikan yang semula dipahami sebagai proses pendewasaan sosial manusia menuju tataran ideal, yang menyangkut tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi atau sumber daya insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*insan kamil*)¹¹ yang dilakukan melalui aktivitas sosial-budaya, telah kehilangan makna *perennial*-nya. Pendidikan kini menjadi ajang mencari laba dan aktivitas mencari keuntungan. Secara sederhana dapat dibedakan pendidikan sebagai aktivitas sosial budaya dengan pendidikan sebagai aktivitas bisnis dan berorientasi keuntungan.

Kemudian jika dikaitkan dengan pergeseran perilaku, maka eksek dari globalisasi menciptakan budaya-budaya baru misalnya budaya konsumerisme, pragmatisme, hedonisme. Sehingga semakin banyak anak muda atau kalangan pelajar yang sering nongkrong di Mall-mall, hanya sekedar kongkow-kongkow atau terdapat banyak pembelajar (siswa dan mahasiswa) yang berfikir pragmatis dan hedonis dengan menjadi "*ayam kampus*" sebagai pelarian atas belitan masalah atau akibat ketidak-siapannya terhadap masuknya arus globalisasi.

3. *Reparadigmatisasi pendidikan sebagai tawaran solusi.*

Dengan sikap kritis terhadap dampak globalisasi, perlu disiapkan suatu konsep paradigam pendidikan sebagai respon dan *counter* terhadap globalisasi. Arus globalisasi memang tidak dapat dibendung karena keharusan sejarah dalam evolusi peradaban manusia, namun mengatur strategi dan mensiasati agar tidak menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan manusia adalah keharusan. Kemajuan IPTEK dan canggihnya sistem sosial, ekonomi-politik

¹⁰ Imam Machali, *Pendidikan Nasional*, hlm, 128.

¹¹ Moh. Hanif Dhakiri, Paulo Freire, *Islam dan Pembebasan*, (Jakarta: Djembatan, 2000), hlm, 3.

adalah untuk manusia yang harus digunakan secara manusiawi bukan sebaliknya kehidupan manusia diserahkan untuk kepentingan teknologi, sistem sosial, ekonomi dan politik. Jika ini terjadi, pengagungan terhadap teknologi akan merebut peran akal sehat, nurani dan kemanusiaan, disinilah menjadi dilema usaha rasional manusia modern menjadi mitos karena apa yang dilakukan itu menjadi irasional.

Dalam pendidikan *reparadigmatisasi* adalah pergeseran paradigma (*shifting paradigm*)¹² secara mendasar terhadap pokok persoalan pendidikan nasional dan bidang sosial dan politik sebagaimana amanat reformasi. Pokok-pokok yang harus dilakukan dalam perubahan paradigma ini adalah:

1. Demokratisasi dan desentralisasi pendidikan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otonomi daerah). Hal ini menandakan bahwa peranan pemerintah berkurang dan partisipasi masyarakat diperbesar. Demikian peran pemerintah pusat diperkecil dari sentralisasi kepada desentralisasi pada pemerintah daerah. Pelaksanaan demokratisasi dan desentralisasi ini harus berjalan secara dinamis, seimbang dan simultan.
2. Konsep kesetaraan dan keseimbangan. Artinya antara SP (satuan pendidikan) yang dikelola pemerintah dan SP yang dikelola masyarakat harus mempunyai hak sama dari pemerintah. Tidak ada lagi istilah SP “*plat merah*” (pemerintah/negeri) atau SP “*plat kuning*” (swasta), semuanya berhak mendapat bantuan dalam suatu sistem terpadu. Demikian juga antara SP yang dikelola oleh DIKNAS, ataupun SP yang dikelola oleh DEPAG yang memiliki ciri khas tertentu.
3. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas pengajar atau guru. Disadari atau tidak komponen yang penting dalam pembelajaran adalah peranan guru dan kualitas guru pengajar. Yakni dengan cara kesempatan meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pelatihan-pelatihan, workshop, seminar dan sejenisnya. Tentunya

¹² Istilah ini mula-mula dikemukakan oleh Thomas Kuhn untuk menjelaskan perbedaan perkembangan ilmu sosial dan alam. Baginya ilmu sosial dikuasai oleh suatu paradigma kemudian paradigma itu merosot dan digantikan oleh paradigma baru yang tidak ada kaitannya dengan paradigma lama. Itulah sebabnya perkembangan ilmu sosial terjadi secara revolusi. Lihat, Thomas Kuhn dalam “*The Strudure of Scientific Revolution*”, (Chicago, The University of Chicago Press, 1980).

seorang guru setelah meningkat kualitas dan keprofesionalitasannya, ia berhak untuk mendapat kesejahteraan yang layak dan memadai.

4. Meningkatkan komitmen pemerintah untuk tetap ambil bagian penting dalam dunia pendidikan. Keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan cuci tangan pemerintah. Dengan komitmen dan manajemen profesional, dana pendidikan dapat dimobilisasi dari berbagai sumber. Yang sering terjadi adalah keterbatasan dana hanyalah alasan untuk menutupi ketidakmampuan dan ketidakmauan pemerintah mengalokasikannya.

C. Budaya Sekolah

1. Masalah lingkungan yang tidak kondusif

Globalisasi dan implikasinya dalam dunia pendidikan sebagaimana telah dijelaskan diatas, jelas berpengaruh (langsung atau tidak langsung) pada lingkungan sekolah (secara khusus) sebagai bagian dari sistem sosial. Kegiatan dan aktivitas yang melingkupi sekolah sebagai eksese globalisasi telah menggeser lingkungan sekolah menjadi tidak kondusif lagi untuk iklim pembelajaran.

Dari aspek pemikiran, pendidikan dalam hal ini sekolah atau kampus tidak lagi dianggap tempat mencari ilmu atau kegiatan akademik-ilmiah, akan tetapi dianggap sebagai tempat kaum muda pembelajar merayakan merayakan status kelasnya. Atau pendidikan dalam pikiran mereka sudah tidak bisa memberikan solusi atas masalah keseharian mereka, hal ini juga dipertegas oleh tayangan-tayangan media elektronik berupa tayangan sinetron yang jauh berbeda dengan latar belakang mayoritas masyarakat dalam hal kesuksesan hidup dengan tahapan pendidikan yang dilalui atau dalam hal ketidak-suksesan karena tingkat pendidikan yang diselesaikan.

Dari aspek personal misalnya seorang guru yang seharusnya "*digugu dan ditiru*" harus mengorbankan idealismenya sebagai guru dengan menjadi tukang ojek atau pengumpul barang bekas hanya karena persolaan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan hidup akibat gaji atau honoranya yang hanya cukup dibelikan sabun dan odol. Akibatnya guru tidak lagi bersemangat dalam proses pembelajaran karena mereka tidak siap atau tidak mempunyai tambahan *stock of knowledge*.

Dari aspek perencanaan, proses pembelajaran yang dilakukan seringkali monoton dan membosankan, karena materi atau media pembelajaran yang ada tidak bisa memberi makna (*meaningfull learning*) pada pembelajar. Hal ini terjadi karena pembelajaran yang dilakukan hanya berorientasi "*lulus UAN*" atau karena guru yang bersangkutan tidak menguasai model-model pembelajaran yang variatif dan inovatif.

Dari aspek moralitas hukum, sering didapati penyelesaian masalah yang selingkuh, mendua dan terbang pilih, baik dalam ranah sekolah ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara umum. Dalam ranah sekolah, sering terjadi hasil akhir dalam perekrutan tenaga pengajar atau pembelajar sangat sarat dengan kolusi dan nepotisme. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, budaya KKN yang melibatkan elite-elite bangsa bahkan para penegak hukumnya sendiri ikut terlibat, turut terseret menjadi pelaku dan tersangka. Keadaan ini adalah kondisi yang sangat tidak kondusif untuk iklim pembelajaran dalam dunia pendidikan.

Dari aspek kebijakan, dalam lingkungan pendidikan kita, kebijakan pemerintah tentang standar kelulusan secara nasional hanya dibebankan pada aspek kognitif pencapaian skor dalam beberapa bidang studi yang di-*UAN*-kan saja (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA), sehingga bidang studi lain yang bukan materi *UAN* yang notabene sangat penting dalam memberikan pembelajaran nilai-nilai moral-spritual seperti bidang studi pendidikan agama terabaikan, baik dari sisi kognitif, afektif dan psikomotoriknya.

2. Masalah mentalitas/moralitas yang masih rendah.

a. Tidak Percaya Diri

Harian Republika pernah melakukan investigasi dengan mewawancarai artis penyanyi dari Indonesia, Nafa Urbach dan penyanyi Pop terkenal Malaysia, Siti Nurhalizah. Pertanyaan sama diajukan kepada keduanya seputar keinginannya untuk menjadi terkenal seperti Brithney Spears, artis top yang disebut-sebut sebagai *diva*-nya musik pop Amerika saat ini. Jawaban Nafa dan Siti ternyata berbeda. Nafa begitu antusias menjadikan dirinya seperti Spears, baik gayanya yang sensual, lirik, maupun kualitas *performancenya*. Sebaliknya Siti justru ingin menjadi diri sendiri. Dengan dalih bahwa budaya Malaysia tidak

bisa begitu saja “mengimpor” budaya Barat yang arogan, seksual, dan penuh luxiorisme.

Yang menjadi persoalan bukan pada jawaban Siti yang seakan-akan alergi terhadap modernisasi barat (*westernized*) dan lebih memilih sesuatu yang bersifat tradisional-konvensional. Sebaliknya juga bukan pada jawaban Nafa untuk mengadaptasi dirinya untuk bergaya seperti Spears dan berfikir lebih modernis. Namun persoalannya justru terletak pada kepercayaan diri untuk mengapresiasi secara positif terhadap kemampuan diri sendiri. Nafa seolah-olah kurang percaya diri akan budaya dan tradisi bangsa sendiri untuk disandingkan dengan budaya global di dunia maju.

Ini menunjukkan adanya salah satu indikasi sederhana betapa pendidikan di Indonesia telah menjadikan anak bangsa tidak memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan, budaya, dan tradisi sendiri. Sikap tidak percaya diri di atas kiranya merupakan implikasi dari adanya penanganan pendidikan di Indonesia oleh pemerintah, sebagai unsur “pinggiran” dan bukan prioritas dari seluruh orientasi sistem pembangunan nasional. Sehingga implikasi pada pengelolaan atau sistem managerial pendidikan yang tidak profesional, dilaksanakan secara amatiran, berdasarkan *common sense*, spekulasi, miskonsepsi. Ini bisa dilihat dari rangkaian inovasi, perubahan sistem, diujicobakan pelbagai kurikulum dan orientasi, seluruhnya belum kelihatan pernah dilakukan evaluasi secara mendalam.¹³

Budaya tidak percaya diri juga lahir karena sistem pendidikan yang ada selama ini belum mengacu pada usaha untuk membebaskan rakyat dari ketertindasan struktur dan birokrasi. Kecerdasan, kemahiran, dan keahlian yang diperoleh lewat pendidikan belum bisa menjadi kekuatan seperti yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, Presiden Pertama RI, dengan “revolusi harapan-harapan yang meningkat” (*revolution of rising expectations*). Kecerdasan, kemahiran, dan keahlian yang dimiliki oleh rakyat siswa dan mahasiswa-masih di bawah pasungan kehendak pembangunan pemerintah, bukan lahir dari idealisme, inspirasi, dan aspirasi diri sendiri.

¹³ Imam Tholikhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan; Mengurai akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 17.

Orientasi sistem pendidikan yang tidak mengakar pada budaya dan dan idealisme sendiri akhirnya berimplikasi pada lahirnya penyakit rendah diri (*inferiority complex*) yang pada gilirannya menimbulkan sikap negatif terhadap semua hal.

b. *Tidak jujur dan manipulasi proses atau hasil*

Masalah mentalitas/moralitas yang menggerogoti pelaku pendidikan, yaitu masalah budaya tidak jujur dan manipulasi proses atau hasil yang tampaknya juga menjadi penyakit kronis yang susah sembuhnya. Mulai dari praktek "menyontek" di kalangan pelajar yang tidak pernah mati, oknum guru yang melakukan tindakan tidak terpuji "membantu" siswa mengerjakan tes, atau membocorkan soal Ujian Nasional, muncul jasa pembuatan tugas akhir, berupa skripsi atau bahkan tesis yang didalamnya dinyatakan dengan bermaterai "Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi/Tesis hasil karya saya sendiri", perekrutan tenaga pengajar atau pembelajar yang sarat dengan KKN tanpa melihat portofolio yang bersangkutan atau hasil seleksi atau tes yang dilaksanakan, hingga pada level yang sangat tragis yaitu jual beli gelar.

c. *Kekerasan dan Perilaku amoral*

Jika kita menengok lebih dalam lagi, praktek pelaksanaan pendidikan di negara kita masih terkesan amburadul, tidak sistematis, dan sangat jauh dari tujuan dari pendidikan itu sendiri dimana filosofi pendidikan/pembelajaran sebagai usaha untuk mengembangkan potensi diri pembelajar dan penanaman nilai-nilai moral-spiritual, pada akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik dalam tataran praktis. Pendidikan dinilai "gagal" manakala *outcome* dan *outputnya* tidak lagi menelorkan pembelajar yang memiliki *thinking skill* dan *social skill* dengan kepekaan nurani yang berlandaskan moralitas, *sense of humanity*.

Kasus kekerasan dan premanisme di IPDN sebagai lembaga yang didirikan untuk menciptakan aparatu-aparatur pemerintahan yang notabene akan menjadi tauladan dan *uswah* bagi masyarakat sangat memprihatinkan, dimana telah terjadi pembunuhan 35 praja sejak tahun 1995, merupakan bukti bahwa proses bahkan produk pendidikan berada pada tingkatan terburuk, jauh sebagaimana diharapkan. Belum lagi kasus amoral dan asusila di kalangan pembelajar, dengan merebaknya VCD porno oleh oknum mahasiswa Iteas Bandung, lalu diikuti oleh yuniornya di kalangan SMP dan SMU menambah daftar panjang praktek asusila peserta didik. Dalam kasus lain seorang anak SMP tega membunuh orang tuanya sendiri, ditempat lain seorang pelajar SD

bunuh diri dengan alasan tidak sanggup membayar SPP. Hal ini terjadi karena pendidikan kita gagal dalam menanamkan nilai-nilai moral-spiritual. Kehilangan moralitas menjadi sumbu hilangnya sendi-sendi masyarakat, yang terbentuk hanyalah peradaban yang sekarat, yang entah sampai kapan menemui ajalnya.¹⁴

3. Beberapa tawaran Solusi.

Melihat realitas diatas, maka perlu digagas upaya-upaya perbaikan dengan tawaran solusi yang mampu menangkal, membentengi timbulnya problematika pada wilayah mentalitas/moralitas di atas. Adapun tawaran tersebut;

Pertama, untuk menangkal budaya Kurang PD (percaya diri), perlu diformulasikan kurikulum, yang mengedepankan “penguatan” akan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi tradisi luhur nenek moyang kita, yang lebih membumi, ketimbang mentransformasi budaya luar yang bisa jadi tidak selaras, berbenturan dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan baik kita.

Sesungguhnya KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) tahun 2006, yang digagas Depdiknas lewat Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), sudah bisa dijadikan payung untuk mengakomodir masalah di atas. Di mana sekolah bersama komite sekolah diberi otonomi menyusun kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sehingga dengan penguatan lewat materi pelajaran budaya lokal (penggalian nilai-nilai humanis-religius misalnya), diharapkan bisa mengikis budaya kurang percaya diri, baik terhadap diri sendiri, maupun kurang percaya diri terhadap lembaga pendidikan kita.

Kedua, Ide memasukkan kurikulum berbasis kejujuran dan anti-korupsi dalam pendidikan tingkat SD-SMU sebagaimana pernah digagas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) belum lama ini, kiranya patut disikapi secara cerdas. Transformasi sekaligus internalisasi nilai moralitas, sensibilitas sosial sungguh sangat efektif melalui perantara bangku pendidikan. Dimana karakteristik dasar siswa SD-SMU tengah menjalani fase-fase proses psikologis yang dominan pada pembentukan karakternya. Jika dalam fase-fase tersebut perkembangan psikologis dapat ditata baik struktur maupun bangun nilai kejujuran plus anti korupsi, maka akan menjadi dasar yang kuat dalam melandasi sikap, langkah, gerak hidup mereka di masa mendatang.

¹⁴ Zaim Elmubarak, *Membumikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 29.

Tentunya internalisasi kurikulum ini harus merambah dalam tiga aspek; kecerdasan (kognitif), sikap (afektif), dan ketrampilan (psikomotorik). Adapun format kurikulum kejujuran dan anti-korupsi ini, menurut hemat penulis tidak harus mewujud dalam satu pelajaran khusus, akan tetapi bisa menjadi sebagai kurikulum yang tersembunyi (*hidden curriculum*).

Ketiga, untuk mengantisipasi rusaknya nilai moral, lagi-lagi perlunya memasukkan "pendidikan nilai/afektif", yang menginternal dalam setiap pelajaran, tidak hanya pelajaran agama tetapi juga pelajaran umum. Kegagalan dalam pendidikan kita salah satunya ditengarai oleh kegagalan dalam penanaman nilai maupun pendidikan moral-religius. Banyak materi-materi pelajaran (tidak hanya pelajaran umum tetapi juga pelajaran agama) ternyata dalam prakteknya lebih mengedepankan aspek kognitif ketimbang aspek afektif/nilai.

Salah satu konsep filosofis pendidikan nilai/afektif menurut Theodore Bramelt adalah pendidikan nilai harus mampu menjadi agen atau perantara yang menanamkan nilai-nilai yang ada dalam jiwa *stake holder*. Dalam pengertian lain mendidik juga berarti memasukkan anak ke dalam alam nilai-nilai, atau memasukkan dunia nilai-nilai ke dalam jiwa anak.¹⁵

Demikian pentingnya penanaman nilai ini juga bisa kita dapati dalam wacana keagamaan, di mana secara fitrah manusia cenderung kepada yang "*haniif*", beragama, bertauhid kepada Rabb-nya. Sehingga memasukkan "nilai-nilai" menjadi sangat urgen pada era dimana telah rusaknya moral anak bangsa. Karena sejatinya anak bangsa harus menjadi penerus/ penyambung generasi tua yang berkewajiban menjaga kelangsungan peradaban manusia dengan mendasarkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, religiusitas sebagai pondasi utamanya.

D. PENUTUP

Selanjutnya, sebagai penutup dari makalah ini akhirnya kami simpulkan hal-hal sebagai berikut:

¹⁵ Drikarya, Drikarya; *tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm, 25.

1. Pendidikan memang tidak dapat lepas dari aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya, menganggap pendidikan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri tanpa ada kaitannya dengan aspek sosial yang melingkupinya akan berakibat pada keterasingan pendidikan dalam realitas dunia nyata.
2. Menanggapi munculnya budaya negatif, di segi mentalitas/moralitas, tawaran merekonstruksi ulang isi kurikulum pendidikan Nasional kita kiranya menjadi sebuah solusi alternatif. Baik melalui penguatan budaya lokal yang mencerminkan keluhuran nilai-nilai kemanusiaan /budaya ketimuran, maupun tawaran kurikulum kejujuran dan anti-korupsi, serta internalisasi pendidikan nilai/afektif dalam setiap materi pelajaran terutama di tingkat satuan pendidikan mulai SD hingga SMU, yang merupakan fase-fase pokok psikologis dalam pembentukan mental-spiritual anak didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhakiri, Moh. Hanif. *Paulo Freire, Islam dan Pembebasan*. Jakarta: Djembatan, 2000.
- Drikarya. *Drikarya: tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Elmubarok, Zaim. *Membumikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Lukmantoro, Triyono. *PTN dalam Hegemoni Fundamentalisme Pasar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Machali, Imam. *Pendidikan Nasional dalam telikungan Globalisasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media & Presma F. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Mulkan, Abdul Munir. *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan dan da'wah*. Yogyakarta: Sipress, 1993.
- Nitiprawiro, Wahono. *Teologi Pembebasan, sejarah, metode, praksis, dan isinya*. Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Tafsir, Ahmad. *Pendidikan Tambalsulam*, dalam [www. "Pikiran Rakyat Online"](http://www.pikiranrakyatonline.com), 15 Februari 2008.

Tholkhah, Imam dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan; Mengurai akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Wibowo, Agus. *Malpraktek Pendidikan*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.

www.sociologyonline.co.uk/Global/Gidden1.htm.

Kenichi Ohmae, *Berakhirnya Negara Bangsa*, terj. Sunarto Ndaru Mursito, *Jurnal Analisis CSIS XXV*, no.2hlm, 1996.

Suyomukti, Nurani. *Pendidikan Berperspektif Global*. Yogyakarta: Al-Ruzz Media, 2008.